

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TRIWULANAN TPID KABUPATEN KEPAHANG

TRIWULAN I 2026

1. Perkembangan Harga Bapokting, Barang Lainnya dan Jasa serta Risiko ke depan Triwulan I 2026

Kabupaten Kepahiang sebagai Kabupaten Non IHK selama Triwulan I 2026 (Januari s.d Maret) Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan, stabilitas ekonomi makro menjadi fondasi utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pada Triwulan I Tahun 2026, kondisi ekonomi makro Kabupaten Kepahiang secara umum menunjukkan tren yang stabil namun memerlukan kewaspadaan tinggi. Sektor pertanian, khususnya komoditas kopi dan lada, tetap menjadi motor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, fluktuasi harga komoditas global dan perubahan pola musim di awal tahun memberikan tantangan tersendiri terhadap tingkat pendapatan petani dan stabilitas harga pangan lokal. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan pemantauan harga antara lain:

1. Melakukan pengecekan harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya di Pasar Kepahiang dan Pasar-pasar Desa yang ada di Kabupaten Kepahiang
2. Melakukan pengecekan stok barang yang ada di pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten Kepahiang
3. Pemantauan harga dan stok barang dilakukan setiap hari kerja
4. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang, Inspektorat Kabupaten Kepahiang selaku pengawas,serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Mencermati perkembangan harga pada triwulan I tahun 2026 periode Januari s.d Maret 2026 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor musiman, di antaranya persiapan menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada triwulan ini menyebabkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok *volatile foods* seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, yang dipicu oleh kendala distribusi serta penyesuaian stok di tingkat pedagang besar. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas tertentu, tingkat inflasi di Kabupaten Kepahiang pada Triwulan I 2026 masih sangat terkendali selaras dengan capaian inflasi regional sebesar 2,25%.

(sumber data: Dinas Perdagangan Kab.Kepahiang)

No	Komoditas	Harga rata-rata Januari (Rp/kg/liter)	Harga rata-rata Februari (Rp/kg/liter)	Harga rata-rata Maret (Rp/kg/liter)
1.	Beras Medium	13.500	13.500	13.750
2.	Minyak Kita	15.700	16.000	15.700
3.	Daging Ayam Ras	40.000	40.900	43.200
4.	Telur Ayam Ras	28.000	28.242	28.800

5. Cabai Merah Keriting	43.500	47.000	30.500
6. Cabai Rawit Merah	77.000	80.000	60.500
7. Bawang Merah	39.700	40.000	40.000
8. Gula Pasir	18.000	18.000	18.000
9. Daging Sapi	130.000	130.000	140.00

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan pemantauan di lapangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog Divre Bengkulu yang mencakup wilayah Kepahiang terpantau mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Meskipun secara umum terkendali, diperlukan antisipasi lebih lanjut untuk menjaga stabilitas pasokan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Pasokan sebagian besar dipenuhi oleh petani lokal, namun ketersediaannya tetap rentan terhadap perubahan cuaca dan pola tanam.
2. Diprediksi akan terjadi peningkatan permintaan bapokting yang sangat signifikan menjelang Idul Fitri. Peningkatan ini diprediksi menjadi pendorong utama kenaikan harga di awal Triwulan II. Yang menjadi pendorong utama kenaikan harga di awal Triwulan II.
3. Potensi hujan lebat atau kekeringan menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu rantai produksi dan distribusi, terutama untuk komoditas hortikultura. Fluktuasi harga pada pakan ternak, pupuk, dan BBM berisiko meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya memicu kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Adanya potensi gangguan di jalur distribusi, baik akibat kondisi infrastruktur jalan maupun faktor lainnya, yang dapat menghambat masuknya pasokan dari luar daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

TPID Kabupaten Kepahiang telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi selama Triwulan I 2026, dengan fokus pada stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan, dengan kegiatan antara lain:

Pada tanggal 18 Februari 2026 dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan Rapat Koordinasi harmonisasi penyusunan proposal program kegiatan dalam percepatan investasi daerah tahun 2026, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat data agar Kabupaten Kepahiang siap menawarkan peluang investasi yang menarik dan valid kepada calon investor di tahun 2026.

2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepahiang menyampaikan Laporan Kinerja TPID Provinsi Tahun 2025 Kepada Ditjen Bangda melalui Email dan Website TPIN.
3. Pada tanggal 04 Maret 2026 Tim TPID Kabupaten Kepahiang melaksanakan High Level Meeting dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan serta menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepahiang Bapak H. Zurdi Nata, S.IP.
4. Sebagai tindaklanjut dari High Level Meeting Tim TPID Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafizh bersama unsur Forkopimda melaksanakan inpeksi mendadak ke Pasar Kepahiang, Rabu 4 Maret 2026. Untuk memastikan harga, pasokan dan permintaan bahan pokok tetap terkendali menjelang hari raya idul fitri 1447 H dan tidak terjadi panic buying. Dari hasil pantauan di lapangan, harga beras masi dalam kondisi normal dan sesuai dengan rekomendasi Bulog, harga daging ayam, daging sapi, dan telur mengalami penurunan dibandingkan sebelum puasa sedangkan untuk pasokan juga dinyatakan aman.
5. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional menuju swasembada pangan nasional, Polres Kepahiang telah melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung di lahan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2026.
6. Sebagai tindaklanjut dari High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Bupati Kepahiang pada tanggal 4 Maret 2026, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi UKM melaksaaakan Operasi Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, yang dilaksanakan selama dua hari mulai dari tanggal 12 s.d 13 Maret 2026 di halaman mall pelayanan publik kepahiang.
7. Pada tanggal 13 Maret 2026 Polres Kepahiang menggelar pasar murah dalam rangka Gerakan Pangan Murah Polri di Terminal Pasar Kepahiang, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
8. Dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Langkah strategis ini bertujuan untuk memitigasi resiko gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan inflasi daerah. Kegiatan pengamanan dan pelayanan dilaksanakan di tiga titik posko strategis, yaitu di Pusat Kota Kepahiang, Simpang Jalan Tebat Monok dan Kecamatan Kabawetan (Area Wisata). Pelaksanaan pengawasan lalu lintas dilakukan selama 12 hari (H-7 hingga H+5) dengan sistem Shift personel selama 24 jam untuk memastikan arus logistik tetap lancar.
9. Bupati Kepahiang H.Zurdi Nata, S.IP menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2026, melalui forum HLM TPID ini diharapkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta intansi terkait semakin kuat sehingga pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Government to Government (G2G) Komoditas Pengendalian Inflasi antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas strategis, sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif.

10. Pada tanggal 27 Maret Bulog melaksanakan Launching Bantuan Pangan Pemerintah untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026 dengan jumlah penerima bantuan pangan 18.248 PBP, beras 364 ton 960 kg, migor 72.992 liter untuk 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang.
11. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sehingga mengurangi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok serta mendukung stabilisasi ekonomi masyarakat. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk periode Januari s.d Maret 2026 dengan jumlah KPM Program Sembako sebanyak 10.964 dengan nominal bantuan Rp.600.000,- per KPM per 3 bulan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

1. Keterjangkauan Harga

- Telah dilaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 3 (Tiga) X dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, jangkauan wilayah perlu diperluas ke kecamatan yang jauh dari pusat kota.
- Penyaluran Beras SPHP melalui mitra-mitra Bulog di Pasar Kepahiang telah berjalan baik dengan harga stabil Rp12.000/kg. Ini terbukti menjadi penyangga utama saat harga beras premium mengalami fluktuasi.

2. Ketersediaan Pasokan

- TPID secara rutin melakukan monitoring ke gudang penyedia dan pasar. Evaluasi menunjukkan stok beras dan gula pasir dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadhan.
- Penggunaan teknologi budidaya (seperti pemanfaatan MA-11 dan Smart Farming) mulai menunjukkan hasil pada ketahanan tanaman hortikultura terhadap cuaca, namun skala implementasinya masih perlu ditingkatkan agar berdampak signifikan pada volume pasokan pasar lokal.
- Telah dilakukan peninjauan dan pemantauan realisasi KAD dengan daerah produsen. Evaluasi mencatat perlunya sinkronisasi jadwal panen antar daerah agar pasokan masuk tepat saat stok lokal menipis.

3. Kelancaran Distribusi

- Dinas Perhubungan dan pihak terkait telah melakukan pengawasan pada jalur distribusi utama. Kendala infrastruktur akibat cuaca ekstrem di beberapa titik sempat menghambat kecepatan distribusi, namun segera tertangani melalui koordinasi lintas sektor.

4. Komunikasi Efektif

- Pelaksanaan HLM yang dipimpin oleh Bupati telah berhasil menyatukan persepsi seluruh OPD dalam pengambilan kebijakan strategis menghadapi tekanan inflasi musiman.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

1. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah G2G dengan merealisasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dijajiki dengan daerah surplus (seperti Sleman atau Kulon Progo) khusus untuk komoditas cabai merah dan bawang merah untuk menjamin kepastian pasokan saat produksi lokal mengalami defisit akibat faktor cuaca, sehingga harga di tingkat pasar tetap stabil.
2. Mengalokasikan BTT untuk subsidi ongkos angkut bagi komoditas pangan pokok yang didatangkan dari luar provinsi (seperti daging ayam ras dan telur), guna memotong rantai margin distribusi yang tinggi akibat kenaikan biaya input transportasi, sehingga harga di tingkat konsumen Kabupaten Kepahiang tetap terjangkau.
3. Memperluas pilot project budidaya cabai dan bawang menggunakan MA-11 dan teknologi greenhouse yang didukung oleh perbankan (BI), supaya memperkuat resiliensi sektor hortikultura lokal terhadap anomali cuaca ekstrem agar produktivitas tetap terjaga sepanjang tahun.
4. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara terjadwal di lokasi-lokasi dengan tingkat konsumsi tinggi dan melakukan sidak pasar bersama Satgas Pangan agar mencegah praktik spekulasi dan penimbunan stok oleh oknum distributor serta memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) aman tersedia.
5. Mewajibkan seluruh petugas pemantau harga untuk melakukan input data secara disiplin ke dalam sistem informasi harga (seperti SP2KP atau aplikasi lokal) setiap hari sebelum pukul 10.00 WIB, supaya dapat memberikan basis data yang akurat bagi pengambil kebijakan (Bupati/Wakil Bupati) untuk melakukan intervensi secara cepat dan tepat sasaran.
6. Mengarahkan kontribusi lembaga keuangan dan perusahaan di Kepahiang melalui forum CSR untuk mendukung program kemandirian pangan, seperti pemberian bibit kepada kelompok wanita tani (KWT), sehingga menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga guna meredam lonjakan permintaan di pasar tradisional.

Kepahiang, April 2026
Mengetahui
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang,

PIISMAN, SE., M.Si
NIP. 197607172002121008